

**KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN TOBELO UTARA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**OLEH:
HABARI ALDRIN**

ABSTRACT

Aldrin Habari Thesis titled "Government Performance Sub North Tobelo North Halmahera as one of the requirements for a bachelor's degree at the Faculty of Social and Political Science, University of Sam Ratulangi in Manado Guided by Drs.W.Y.Rompas, Msi and Dra.Joyce.J.Rares ,Msi

Research in the framework of the preparation of Tier One Degree thesis at the Faculty of Social and Political Sciences Unsrat was preceded by preliminary observations that the results show that the performance of the government district of North Tobelo North Halmahera indicated low. Thus, this study aims to assess the performance of the District Government organization North Tobelo North Halmahera. This study uses an approach or descriptive-qualitative method. Data were collected through interview techniques, observation and questionnaires were distributed to 42 respondents coming from the government district, village government and community service users in North Tobelo District Office. Once the data is collected, then analyzed by applying the frequency table analysis (analysis of the percentage). The results showed that the performance of the government district of North Tobelo, which consists of six dimensions, namely productivity, quality of service, responsiveness (responsiveness), responsibility, public accountability and justice, it is the lowest dimension of justice, while the highest average achievements is the dimension of public accountability. The low average achievement of justice has to do with cultural values are still strong paternalistic society, where officials and people were still able to be treated special than ordinary people.

The conclusion that can be drawn from these results is that in general, the achievement of the performance of the District Government of North Tobelo quite high, but not optimally. This is because this new district was expanded about six years ago (still life of a baby), so there are still many limitations, both in terms of power sumebr apparatus, facilities / infrastructure, equipment and facilities of public pelayanan. It is recommended that the government should run a program empowering and coaching personnel through the establishment and coordination of Board meetings pengefektivan Harmony Ummah (bku).

Keywords: Performance, Government, District.

PENDAHULUAN

Berbicara masalah kinerja organisasi publik, terlebih setelah diberlakukannya paket undang-undang otonomi daeah, yakni UU Nomor 22 tahun

1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diubah dengan UU. Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Bagi Pemerintah Kecamatan Tobelo Utara sebagai bagian dari pemerintah Daerah

Kabupaten Halmahera Utara merupakan organisasi yang mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat/instansi pemerintah daerah yang ada ditingkat kecamatan, tingkat atas dan pemerintah desa/kelurahan serta memberikan pelayanan public kepada masyarakat, maka penilaian kinerja bagi aparatur organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang.

Selama ini, penilaian secara sistematis terhadap kinerja aparatur belum menjadi tradisi, sehingga berakibat pada munculnya perdebatan yang tidak terselesaikan ketika terjadi hasil penilaian yang berbeda antara pihak yang satu dengan lainnya. Bahkan ada kesan bahwa penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sering direayasa agar menampilkan sosok kinerja pemerintah yang optimal dicapai, padahal realitas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja instansi pemerintah tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Sebagai contoh, misalnya penetapan target yang rendah sehingga

mudah dicapai (100%) dengan tanpa melakukan analisis potensi sumberdaya dalam menetapkan target.

Hal sama sering terjadi pada penetapan target kinerja layanan publik, sehingga walaupun kelihatan telah mencapai target, namun sering mendapat keluhan dari masyarakat pengguna layanan tentang kelambanan penyelesaian suatu urusan dan biaya/tarif yang tidak standard, bahkan ada biaya tambahan yang disediakan atau diberikan oleh pengguna layanan untuk mempercepat proses layanan yang sementara diurus. Hal ini paling tidak berlaku pula pada Pemerintah Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara sebagai lokasi penelitian ini. Bahkan lebih ironis lagi, bahwa pemerintah Kecamatan Tobelo Utara hingga saat ini belum mampu menyusun LAKIP yang benar-benar mencerminkan sebagai sebuah organisasi publik yang seyogyanya memiliki tanggungjawab akuntabilitas public.

Kinerja ialah terjemahan dari istilah "*performance*" yang umumnya diartikan sebagai tingkat prestasi atau tingkat produktivitas atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi selama satu periode waktu tertentu (Chung dan Megginston dalam Gomes, 1999).

Kinerja pemerintah juga menunjukkan sampai seberapa jauh pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dijanjikan kepada publik. Ammons (Hwang-Sun Kang, 2003: 425-426) menggunakan ukuran kinerja pemerintah melalui kriteria Workload, efficiency, effectiveness, dan productivity, Workload menunjukkan jumlah beban kerja yang berhasil diselesaikan. Efficiency menunjukkan perbandingan antara input dan output. Effectiveness menunjukkan perbandingan antara output dan outcome yaitu tingkat ketercapaian hasil akhir setelah *output* diperoleh. Sedangkan *productivity* menunjukkan jumlah hasil yang dicapai pada kurun waktu tertentu. Dwiyanto (1995, 9) mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, termasuk kinerja pemerintah daerah, yaitu :

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Pada tataran ini, konsep produktivitas dirasa terlalu sempit sehingga General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran

produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, sebab akses untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relatif sangat mudah dan murah.

3. Responsivitas.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

4. Responsibilitas.

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, politik tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu, responsibilitas

bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas.

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Ahli lain, seperti Kumorotomo (1996) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang bersifat dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

2. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

3. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercakupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Salah satu nilai dasar yang sering dipertanyakan masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah dalam mengurus hak-hak mereka

sebagai warga negara adalah "keadilan". Adil dalam memperlakukan masyarakat tanpa pandang bulu merupakan filosofi utama administrasi publik. Hal ini ditekankan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) yang dikutip Frederickson (2003:60) dengan mengatakan bahwa "keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan adalah menciptakan keadilan (*Justice*) dalam mengatur struktur dasar kehidupan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan Henry (1988:171) mengatakan bahwa filosofi *justice-as-fairness* merupakan dasar (fundasi) kerangka dasar bagi para pelaksana administrasi negara". Artinya, para pelaksana administrasi negara harus memahami dengan tegas bahwa filosofi administrasi negara adalah "keadilan" (*fairness*), sedangkan filosofi administrasi bisnis menurut Atmosudirdjo (1982: 315) adalah "*the filosofi of the Business* berkisar pada keuntungan-keuntungan, dan fungsi laba (profit)". Tentu saja dalam administrasi bisnis ada perlakuan pelayanan istimewa (berbeda/ketidakadilan) terutama bagi pelanggan potensial atau pelanggan yang memberikan keuntungan besar kepada

perusahaan. Sedangkan perlakuan bagi administrasi publik adalah sama (adil).

4. Daya Tanggap.

Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu organisasi secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan/ metode yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu (Singarimbunan Effendi, 1995). Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Senada dengan pendapat sebelumnya, Sugiyono (1992) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan diri pada kajian tentang kinerja organisasi pemerintah Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Konsep pengukuran kinerja organisasi pemerintah digunakan pendapat Dwiyanto (1995) yang meliputi beberapa dimensi, yaitu : produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kemungkinan pula dikembangkan dengan menerapkan dimensi-dimensi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Kumorotomo (1996), yakni : efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap.

3. DATA DAN SUMBER DATA

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan dan sekunder. Data primer adalah data yang sumber dari sumber data (nara sumber) secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang telah melalui diolah dan disajikan dalam bentuk data statistik, data dokumen, laporan dan lain-lain.

4. CARA PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :wawancara mendalam(*indept interview*) secara langsung kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

pokok permasalahan yang diteliti, yakni posisi kinerja organisasi pemerintah Kecamatan Tobelo Utara. Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga didukung dengan instrumen kuesioner (daftar pertanyaan penelitian) yang akan dikembangkan untuk menjangkau data yang mungkin tidak tercover atau lolos melalui wawancara.

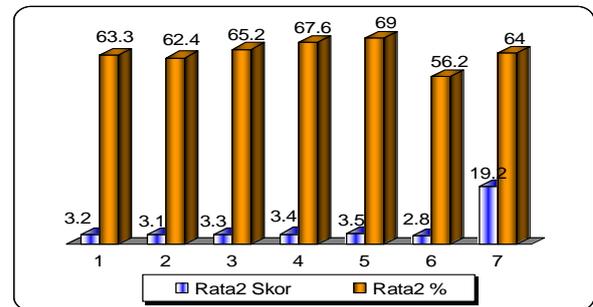
5. RESPONDEN

Responden adalah orang yang diharapkan dapat memberikan data dan atau informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, responden merupakan nara sumber atau sumber data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian deskriptif.

6. CARA ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara Deskriptif Analisis. Penelitian secara deskriptif analisis di sini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan konsep yang akan diteliti yang bersumber dari hasil wawancara mendalam. Disamping melakukan analisis, hasil penelitian akan diterjemahkan, dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Rangkuman Hasil Analisis Kinerja Pemerintah Kecamatan Tobelo Utara

Keterangan :

- 1 = Produktivitas
- 2 = Kualitas Layanan
- 3 = Responsivitas
- 4 = Responsibilitas
- 5 = Akuntabilitas Publik
- 6 = Keadilan
- 7 = Kinerja Pemerintah Kecamatan Tobelo Utara

Mengacu pada hasil analisis data yang dideskripsikan melalui Gambar 2, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Dimensi tertinggi yang rata-rata dicapai oleh pemerintah Kecamatan Tobelo Utara adalah Akuntabilitas publik, yakni rata-rata sebesar 3,5 atau 69 % dari kriteria akuntabilitas publik. Artinya masih menyisakan sekitar 31 % yang belum tercapai. Hal-hal yang belum tercapai berkaitan dengan akuntabilitas publik adalah berkisar pada tingkat kesesuaian kegiatan pemerintah kecamatan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. Hal ini lebih

terfokus pada nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang belaku dalam masyarakat.

Realitas ini dapat dipahami, mengingat masyarakat Tobelo Utara terdiri dari dua sub-etnis, yakni etnis Tobelo dan Etnis Galela. Kedua sub-etnis inipun telah terjadi asimilasi dengan sub-sub etnis lainnya, baik yang ada di Maluku Utara maupun dari luar Maluku Utara sehingga melahirkan nilai budaya dan adat istiadat yang berbeda. Kondisi ini agak menyulitkan pemerintah untuk menemukan formula kebersamaan nilai budaya yang dapat terwujud dalam kesatuan sikap dan perilaku masyarakatnya. Dengan demikian akan melahirkan program/kegiatan yang harus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, salah satu tugas yang dijadikan sebagai program pemerintah Kecamatan Tobelo Utara dewasa ini adalah membangun partisipasi masyarakat menyangkut dengan nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, dan nilai-nilai partisipatif lainnya.

2. Dimensi dari kinerja pemerintah Kecamatan Tobelo yang pencapaian rata-ratanya paling rendah adalah

dimensi “keadilan”, yakni hanya sekitar 56,2 %, sehingga masih menyisahkan sekitar 43,8 % yang belum dicapai. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh nilai budaya paternalistik yang masih kental dalam praktek birokrasi di Indonesia, termasuk pemerintah Kecamatan Tobelo yang secara histories pernah berada dibawah kekuasaan Kesultanan Ternate.

3. Secara umum, capaian kinerja pemerintah Kecamatan Tobelo Utara berada pada kategori “cukup tinggi” dengan rata-rata capaian sebesar 64 %. Ini berarti masih menyisahkan sekitar 36 % yang belum terealisasi.

Realitas hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kecamatan Tobelo Utara dihadapkan pada permasalahan kinerja yang cukup serius, karena 36 % tersisa merupakan angka yang tidak kecil disbanding dengan pemerintah Kecamatan lain yang biasanya mencapai target kinerja diatas 90 %. Rendahnya rata-rata capaian kinerja pemerintah Kecamatan Tobelo Utara mungkin dapat dipahami karena wilayah ini baru sekitar enam tahun lalu dimekarkan dari Kecamatan Tobelo (kecamatan induk) sehingga masih

cukup banyak keterbatasan, baik dari sumberdaya manusia aparatur, sarana/prasarana, peralatan kerja maupun fasilitas pelayanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil analisis data pada bagian sebelum, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Kinerja pemerintah kecamatan Tobelo Utara meliputi enam dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas (daya tanggap), responsibilitas, akuntabilitas publik dan keadilan. Keenam dimensi tersebut, ternyata yang paling rendah adalah dimensi keadilan, sementara yang paling tinggi rata-rata capaiannya adalah dimensi akuntabilitas publik. Masih rendahnya capaian rata-rata dimensi keadilan ada kaitannya dengan nilai budaya paternalistik yang masih kental dalam masyarakat, di mana para pejabat dan orang mampu masih diperlakukan istimewa dibanding masyarakat biasa.
2. Secara umum, pencapaian kinerja pemerintah kecamatan Tobelo Utara cukup tinggi, namun belum optimal. Hal ini disebabkan karena Kecamatan ini baru dimekarkan

sekitar enam tahun lalu (masih umur bayi) sehingga masih banyak keterbatasan, baik dari segi sumberdaya aparatur, sarana/prasarana, peralatan kerja maupun fasilitas pelayanan publik.

3. SARAN

Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini, maka perlu disarankan beberapa hal, yaitu :

1. Untuk memacu peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Tobelo Utara, khususnya dimensi keadilan, maka pemerintah perlu menjalankan program pemberdayaan dan pembinaan aparatur pemerintah melalui pembentukan pengefektivan Rapat Koordinasi Badan Kerukunan Ummat (BKU).
2. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan Tobelo secara keseluruhan, maka diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah Kecamatan untuk setiap tahun mengusahakan penyusunan program dan LAKIP yang sesungguhnya guna mendorong pembangunan sumberdaya aparatur, sarana/prasarana, peralatan kerja maupun fasilitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bennis, W.G. 1962. Toward a truly scientific management: the concept of organizational health. *Industrial Management Review* (MIT) 4.
- Bouckaert, G., K. Verhoest, and B. Vershuere, 2003, *Public Management and Governance: An Introductory Text*, London: Routledge.
- Callahan, K. 2003. Performance Measurement, Citizen-driven. Dalam J. Rabin, (ed). *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. New York: Marcel Dekker Inc. 910-916.